



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Raya Padang Ratu No.01 Komplek Perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung Kode Pos: 34161

Website: www.diskominfo.lampungtenengahkab.go.id

Email : kominfolampngtengah@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1. Latar Belakang	6
2. Maksud dan Tujuan.....	7
3. Kedudukan Tugas pokok dan fungsi Dinas	9
4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.....	15
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	16
6. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Substansi	26
7. Sumber Daya Keuangan... ..	35
8. Sumber Daya Manusiain... ..	35
9. Sarana dan Prasarana... ..	36
10. Isu Strategis Organisasi.....	37
BAB II PEPERENCANAAN KERJA.....	44
A. Rencana Strategis	44
A. Visi	44
B. Misi.....	44
B. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
A. Capaian Kinerja.....	58
B. Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	74
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga.

Untuk melaksanakan kewajiban pembangunan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya secara maksimal mengerahkan segala sumber daya yang tersedia demi “Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”, sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Lampung Tengah.

Secara garis besar upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah, namun juga merupakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dukungan dunia usaha, serta partisipasi masyarakat secara luas. Dalam tahun 2023 ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan 5 program kerja, terlaksananya 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Penilaian atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2023 ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut:

I. PROGRAM URUSAN PENUNJANG

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah

- 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Jasa Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7. Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan;
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Komunikasi Publik;
 - 1.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 1.3 Pelayanan Informasi Publik;
 - 1.4 Layanan Hubungan Media;
 - 1.5 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
 - 1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
 - 1.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pengolahan, Analisis dan Pengumpulan Diseminasi Data Statistik Sektoral

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023, total Anggaran sebesar Rp. 8.574.583.786 dengan realisasi sebesar Rp. 8.069.339.517,57 atau sebesar 97,32 Persen.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Peningkatan dan pemantapan koordinasi tentang sasaran, kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang. Hal ini penting untuk mengukuhkan komitmen bersama terhadap visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga visi menjadi visi bersama (*Shared Vision*) dari semua pihak.
2. Keberhasilan yang dicapai bukan semata-mata karena kapabilitas dan kompetensi ataupun keunggulan aparatur, tetapi juga karena adanya pengawasan dari berbagai pihak melalui Aparatur Pengawasan Fungsional (APF) maupun pengawasan politis oleh pihak legislatif.
3. Meningkatkan Pengelolaan informasi, teknologi, komunikasi dan statistik, mencakup pengembangan infrastuktur IT, penyelenggaraan statistik serta koordinasi dan pelaksanaan program komunikasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi publik.

Pencapaian kinerja demikian akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasi.

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Diskominfo Kabupaten Lampung Tengah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Diskominfotik Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Tahun 2023. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Peningkatan nilai Indeks SPBE;
2. Terwujudnya program satu data Indonesia;
3. Kepuasan Publik terhadap penyebar luasan Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Infrastruktur Teknologi;
5. Peningkatan Keamanan data;
6. Inovasi Teknologi;
7. Pelatihan dan Pengembangan SDM.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 MAKSUD

- a. **Transparansi**
Memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang kinerja dan pencapaian dinas dalam bidang komunikasi informatika dan statistic.
- b. **Evaluasi Kinerja**
Menyediakan data dan informasi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efektivitas program yang telah dilaksanakan
- c. **Pertanggungjawaban**
Menunjukkan pertanggungjawaban dinas terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya yang diberikan

2.2 Tujuan

- a. **Memonitor Kinerja**
Menilai sejauh mana dinas mencapai target dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.
- b. **Perbaikan Proses**
Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses oprasional dan manajerial agar lebih efisien dan efektif.
- c. **Pemenuhan kewajiban hukum**
Memenuhi kewajiban hukum terkait pelaporan kinerja dan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. **Ketertiban dan Akurasi Data**
Menjaga ketertiban dan akurasi data statistik yang dihasilkan dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- e. **Pengambilan Keputusan**
Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan terkait rencana

dan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan terkait rencana dan kebijakanyang akan di ambil di masa yang akan datang.

Melalui laporan ankuntabilitas dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat memberikan informasi yang komprehensif dan terpercaya kepada pemengku kepentingantermasuk masyarakat umum untuk membangun kepercayaan dan mendukung transparansi pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

3. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah 2023 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pemabungan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan/ Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peningkatan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu dinas yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu program pengelolaan aplikasi

informatika, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah yaitu Terwujudnya Kabupaten Lampung , sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi. Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu dinas yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis sebagai leading sektor dalam implementasi smart city berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai smart city sebagai upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat

5. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

1. Kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi Informatika dan Statistik, pertanahan dan penataan ruang yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah merupakan perangkat daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok "Membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan”

3. Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas didukung oleh Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang, yaitu:

1. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian dan Sub Koordinasi yaitu:
 - 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1.3 Substansi Keuangan dan Aset.
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 Sub Koordinasi:
 - 2.1 kelompok Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - 2.2 kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2.3 kelompok Substansi Kemitraan Informasi, komunikasi Publik.
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Komunikasi Publik terdiri dari 3 Sub Koordinasi:
 - 3.1 kelompok Substansi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 3.2 Kelompok substansi Pengembangan Aplikasi dan Informatika;
 - 3.3 kelompok Substansi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 Sub Koordinasi:
 - 4.1 Kelompok Substansi Layanan Informasi dan Dokumentasi;

- 4.2 Kelompok Substansi Sumber Daya dan Layanan Publik;
- 4.3 Kelompok Substansi Layanan Hubungan Media.
- 5. Bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi terdiri dari 3 Sub Koordinasi:
 - 5.1 Bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi;
 - 5.2 Seksi Statistik Sektoral;
 - 5.3 Kelompok Substansi Pos dan Telekomunikasi.

6. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2023, didukung oleh Sumber Dana Keuangan yang diperoleh dari APBD.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mempunyai Pegawai sebanyak 84 Orang yang terdiri dari ASN 26 orang, dan Tenaga Kontrak 58 Orang, dengan rincian:

No	Nama	Jenis kelamin		Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1		
2	Sekertaris Dinas	1		
3	Kepala Bidang	3	1	
4	Kasubag/Kepala Seksi	4	1	
5	Sub Koordinasi	9	1	
6	Staff	5		
	JUMLAH	23	3	
		26		

No	Nama	Jenis kelamin		Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Penjaga kebersihan – NON ASN	2		
2	Tenaga Administrasi –	25	10	

	NON ASN			
3	Tenaga IT – NON ASN	10	2	
4	Tenaga Liputan – NON ASN	8		
5	Driver – NON ASN	1		
	JUMLAH	46	12	
		58		

8. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai leading sector dalam pengelolaan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di bidang komunikasi dan Informatika sampai pada tingkat kampung/ kelurahan. Keberadaan sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang terinventarisir antara lain:

Prasarana yang ada saat ini adalah berupa:

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1.	Minibus	5	Unit
2.	Sepeda Motor	5	Unit
3.	Laptop	10	Unit
4.	Meja	18	Unit
5.	Filling Kabinet	14	Unit
6.	Kamera Film	9	Unit
7.	Camera Vidio	7	Unit
8.	Vidiotron	1	Unit
9.	Audio Visual	3	Unit
10.	Alat Studio Vidio lainnya	39	Unit
11.	TV Monitor	6	Unit
12.	Printer	11	Unit
13.	Scanner	2	Unit
14.	Peralatan antenna	3	Unit
15.	Kursi	34	Unit
16.	Komputer	27	Unit
17.	Peralatan	6	Unit

	jaringan		
18	Handy Talky (HT)	15	Unit
19.	CPU	3	Unit

9. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mengadopsi teknologo terbaru untuk meningkatkan efesiensi oprasional dan layanan publik serta kemampuan mengelola data besar dan melakukan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan data dan menjamin keamanan dan privasi data terutama dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Melaksanakan Kerjasama lintas sectoral kolaborasi dengan berbagai instansipemerintah dan non pemerintah untuk sinergi data dan teknologi agar transparansi dan akuntabilitas dapat menyediakan laporan yang akurat dan transparan untuk mempertahankan kepercayaan publik, agar terlaksananya program-program perlu adanya pelatihan dan pengembangan ketrampilan bagi pegawai di bidang TI, komunikasi dan analisis statistik. Memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TI untuk mendukung layanan digital serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk terus meningkatkan layanan dan oprasi. Fokus pada aspek aspek ini membantu dinas komunikasi informatika dan statistik dalam menyediakan layanan yang efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan dan kemajuan teknologi di tingkat Kabupaten Lampung Tengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

A. **Strategi**

Untuk mencapai strategi ditetapkan dengan program dan kumpulan kegiatankegiatan, terangkai secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dapat disusun program-program prioritas selama lima tahun sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 3. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Sacara dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- B. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1. Layanan Hubungan Media;
 - 2. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan;
 - 3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media Kemitraan Komunitas;
 - 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 5. Pelayanan Informasi Publik;
 - 6. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - 7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
- C. Program Aplikasi dan Informatika
 - a. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
 - 3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - 5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
 - 6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - 7. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
 - 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- D. Program Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
 - 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - 3. Membangun Metadata Statistik Sektoral;
 - 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral;
 - 5. Pengembangan Infrastruktur;
 - 6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.
- E. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
 - 3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

4. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai alat dari mencapai tujuan dan sasaran strategis yang memberikan konstruksi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik diharapkan dapat memacu perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi:

B. *Faktor Internal*

Faktor-faktor yang selalu dihadapi untuk mencapai tujuan meliputi Faktor Internal yaitu:

1. Keterbatasan SDM

Kurangnya personil yang memiliki keahlian khusus di bidang TI, komunikasi, dan statistik

2. Pengelolaan Anggaran

Keterbatasan anggaran untuk proyek dan pembaharuan teknologi serta tantangan dalam pengelolaan anggaran yang efisien.

3. Perubahan Teknologi

Kesulitan dalam mengikutiperkembangan teknologi yang cepat dan implementasi solusiteknologi terkini

4. Keamanan Data

Tantangan dalam menjaga keamanan data dan resiko kebocoran data

5. Resistansi terhadap perubahan

Resistensi dari staf terhadap perubahan baik terkait pengadopsian teknologi baru atau perubahan proses kerja.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi manajemen yang efektif, investasi dalam pelatihan dan infrastruktur serta pendekatan proaktif dalam mengadopsi teknologi dan inovasi baru.

C. *Faktor Eksternal*

Faktor-faktor yang selalu dihadapi untuk mencapai tujuan meliputi Faktor Eksternal yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Pusat

Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah berpengaruh besar pada operasional dan strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik kabupaten Lampung Tengah

2. Perkembangan Teknologi

Perkembangan cepat di bidang teknologi seperti Cloud computing, big data, AI dapat memberikan peluang sekaligus tantangan

3. Tingkat Literasi digital masyarakat

Tingkat pemahaman dan penerimaan teknologi oleh masyarakat

- mempengaruhi efektivitas penerapan solusi digital
4. Kerjasama dengan sector swasta
Potensi kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan untuk pengembangan infrastruktur dan solusi IT.
 5. Regulasi dan kebijakan privasi data
Hukum dan regulasi terkait privasi dan keamanan data yang harus dipatuhi
 6. Ancaman dan keamanan siber
Resiko keamanan siber yang harus berkembang dan memerlukan upaya keamanan yang beradaptasi
 7. Kerjasama antar Lembaga Pemerintah
Interaksi dan Kerjasama dengan Lembaga pemerintah lainnya baik di tingkat local maupun Nasional

Dengan memahami dan menyesuaikan diri terhadap factor-faktor eksternal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kekuatan, Kelemahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

D. Kekuatan (Strength)

1. Akses ke Informasi dan data: sebagai pusat informasi memiliki akses luas ke data dan statistik yang dapat mendukung pengambilan keputusan
2. Penguasaan Teknologi: memiliki keahlian teknis dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan public
3. Jaringan Luas: Potensi memiliki jaringan yang luas dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah
4. Inisiatif Digitalisasi
Kemampuan untuk memimpin inisiatif digitalisasi dalkam pemerintah
5. Dukungan Pemerintah
Biasanya mendapat dukungan langsung dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah baik dalam bentuk kebijakan dan pendanaan

E. Kelemahan (Weaknesses)

1. Keterbatasan SDM: Kurangnya staf yang terlatih bidang analisis data dan persandian
2. Infrastruktur yang tidak memadai: Potensi memiliki infrastruktur TI yang using atau tidak mencukupi kebutuhan terkini.
3. Kesulitan mengikuti perkembangan teknologi: Perkembangan teknologi yang cepat bisa menjadi tantangan untuk tetap up-to-date
4. Resistensi terhadap perubahan: resistensi terhadap perubahan terutama dalam adopsi teknologi atau proses kerja baru
5. Masalah Keamanan Data: Menghadapi resiko keamanan data termasuk ancaman siber dan kebocoran informasi

Memahami kekuatan dan kelemahan ini sangat penting untuk merencanakan strategi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau investasi tambahan.

F. Ancaman

1. Ancaman Keamanan siber : Resiko serangan siber seperti malware, ransomware dan phishing yang dapat mengganggu Infrastruktur TI dan keamanan data
2. Perubahan cepat dalam teknologi : Kesulitan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang cepat yang dapat membuat system yang ada menjadi usang
3. Kebocoran data dan pelanggaran privasi : resiko kebocoran data sensitive yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan public
4. Ancaman alam dan bencana : resiko bencana alam seperti banjir dan kebakaran yang dapat mengganggu infrastruktur dan layanan.
5. Mengidentifikasi dan mengatasi ancaman- ancaman ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan operasi dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam melayani kebutuhan publik

Berdasarkan analisis tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah, menetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur TI
2. Penguatan Keamanan siber
3. Meningkatkan Publikasi Program – program Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
4. Meningkatkan Publikasi yang memiliki sumber data yang akurat
5. Meningkatkan Penggunaan sosial media, untuk mempromosikan hasil pembangunan.
6. Meningkatkan *smart city* sebagai kota cerdas atau kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari

G. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu yang disusun berdasarkan pandangan dari pimpinan puncak organisasi beserta pimpinan lainnya. Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Tengah, maka ditetapkan Kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Privasi Data
2. Kebijakan Keamanan Informasi
3. Kebijakan Digitalisasi Layanan Publik
4. Standar Pengelolaan TI
5. Kebijakan Pengembangan SDM
6. Kebijakan Pengelolaan Data
7. Kebijakan Keterbukaan Informasi
8. Kebijakan Kerjasama dengan swasta
9. Kebijakan Adaptasi teknologi baru
10. Mempercepat pelaksanaan *Smart City* dengan infrastruktur dasar sehingga memiliki system transportasi yang lebih efisien dan terintergrasi
11. Mengembangkan smart city dalam rangka implementasi gerakan Menuju 100 Smart City yang digagas pemerintah pusat.

Tabel 1.1 Menggambarkan ringkasan keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi dan kebijakan yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 1.1 Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik yang dapat menjangkau masyarakat luas	Peningkatan sistem manajemen pemerintahan	Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen pemerintahan
	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Nilai Indeks SPBE	Meningkatnya Pengelolaan SPBE
	Terselenggaranya Satu Data Indonesia	Peningkatan Jumlah Data Sektoral	Meningkatnya Pengelolaan Jumlah Data Sektoral

	Terselenggaranya Keamanan Informasi Publik	Peningkatan Jumlah Informasi Publik yang teramankan	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik
--	--	---	---

Tabel diatas menggambarkan ringkasan keterkaitan tujuan, sasaran, dan strategi dan kebijakan yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.

H. ISU DAN PERMASALAHAN

Menghadapi berbagai isu yang unik karena posisinya dalam struktur pemerintahan dalam bidang komunikasi, informatika dan statistik, yaitu:

1. Integrasi sistem dan data
2. Peningkatan infrastruktur dan akses internet
3. Satu Data Indonesia
4. Perlindungan Data
5. Digitalisasi layanan publik
6. Keterbukaan dan transparansi informasi
7. Kolaborasi dengan stakeholder Penyebaran informasi

Mengamati isu isu ini memerlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan perencanaan strategis, investasi dalam teknologi dan SDM serta kolaborasi yang kuat antara berbagai stakeholder.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas SDM yang sangat kurang Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan, ketersediaan SDM yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk saat ini masih sangat kurang ditinjau dari aspek kuantitas dan aspek kualitasnya

2. Minimnya data teknis yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan:
 - a. Kapasitas sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam penyusunan database Cakupan layanan telekomunikasi dan Publikasi
 - b. Belum adanya SDM bidang statistik yang sesuai dengan keahliannya.
 - c. Dokumen teknis yang telah disusun belum optimal digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lanjutan
 - d. Belum maksimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia
 - e. Belum maksimalnya pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja (Renja) PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) PD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja (Renja) PD didasarkan atas pertimbangan
- c. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD ;
- d. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- e. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja (Renja) PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD ;
- f. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Rencana Kerja (Renja) PD merupakan penjabaran dan

adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti 12 RPJMD, Renstra PD dan RKPD.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah , harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Adapun penjabaran tujuan dan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfotik
Kabupaten Lampung Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	0	1,68	2,10	2,68	3,00	3,10	3,20

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfotik
Kabupaten Lampung Tengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Publik	-	82	84	85	86	87	87,5
Meningkatnya Kualitas data statistik Sektoral	Indeks IPS	-	-					

Meningkatnya Keamanan Informasi Publik	Indeks KAMI	-	250	260	279	280	285	290
--	-------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.2 Strategi Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan PD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah

No	Sasaran strategis	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

			Pemerintahan Daerah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Meningkatnya Nilai SPBE	Program pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Evaluasi PD	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Keamanan Informasi Publik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.3 . Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia di Lampung Tengah.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Tingkat	Nilai Standar Kepuasan	80,98
t			

	Kepuasan Publik	Publik	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	95
3	Meningkatnya Nilai SPBE	Indeks Nilai SPBE	2,68
4	Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Pelaporan PD	Satu Data Indonesia	Baik
5	Meningkatnya Pengamanan Informasi Publik	Jumlah PD yang mengamankan Informasi Publiknya	61

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah diimplementasikan melalui 4 (Empat) Program yaitu:

Tabel 2.5
Program Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.039.799.739	

2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.929.000.000	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.565.784.047	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.000.000	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informas 1	0	
	Total Anggaran	8.534.623.786	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja PD, dimana pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan PD sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tersebut berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat melaksanakan pengukuran capaian kinerja yang telah ditetapkan perlu ditetapkan skala penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan, dimana parameter tersebut sebagai berikut:

<i>NO</i>	<i>NILAI</i>	<i>KRITERIA</i>
1	> 80%	Sangat Berhasil
2	70% - 80 %	Berhasi
3	50% - 70%	Cukup
4	< 50%	Kurang Berhasil

Capaian kinerja DISKOMINFO Basel tahun 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama DISKOMINFOTIK Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kominfotik Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 - 2026 yaitu:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian (%)
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Tingkat Tingkat Kepuasan Publik	Nilai Standar Kepuasan Publik	Nilai	80,98	80,89	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Persentase dokumen perencanaan,	Persen	100	100	100

	Penunjang urusan Pemerintah	penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen	75	75	75
4	Meningkatnya Nilai SPBE	Indeks Nilai SPBE	Nilai	2.68	2.68	100
5	Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Pelaporan PD	Satu Data Indonesia	Predikat	Baik	Baik	100
6	Meningkatnya Pengamanan Informasi Publik	Jumlah PD yang teramankan Informasinya Publiknya	PD	61	61	100

1. Untuk mendukung Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatkan Tingkat Kepuasan Publik dengan indikator Nilai Standar Kepuasan Publik target capaian sebesar 80,98 % dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 80,98 %.
2. Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator:
 - a. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan target capaian sebesar 100% dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.

- b. Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti, dengan target capaian sebesar 100% dan realisasi capaian sebesar 100%.
 - c. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik, dengan target capaian sebesar 95% dan realisasi capaian sebesar 95%.
3. Sasaran strategis Tiga yaitu Meningkatnya Nilai SPBE dengan Indikator Indeks SPBE dengan target capaian 2,68, dengan realisasi 2,68
 4. Sasaran strategis empat yaitu Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah dengan Indikator Satu Data Indonesia dengan target capaian Baik, dengan realisasi Baik
 5. Sasaran strategis Lima yaitu Meningkatnya Pengamanan Informasi Publik Perangkat Daerah dengan Indikator KAMI dengan target capaian 61 PD, dengan realisasi 61 PD

3.1.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Berikut adalah perbandingan antara Target dan realisasi Indikator Kinerja Pada Dinas Komunikasi Informatika dan statistik Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Publik	Nilai Standar Kepuasan Publik	80.00	80,00	80,89
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100
		Persentase Temuan	100	100	100

		Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	75	75	75
4	Meningkatnya Nilai SPBE	Indeks Nilai SPBE	1,68	2.10	2.68
5	Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Pelaporan PD	Satu Data Indonesia	-	Baik	Baik
6	Meningkatnya Pengamanan Informasi Publik	Jumlah PD yang teramankan Informasi Publiknya	-	61	61

1. Untuk mendukung Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatkan Tingkat Kepuasan Publik dengan indikator Nilai Standar Kepuasan Publik pada tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai kinerja 80 % pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 80,98 %.
2. Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator:
 - a. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 100% dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100%.
 - b. Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 realisasi capaian sebesar 100% juga.
 - c. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik pada tahun 2021,2022 dan 2023 .
3. Sasaran strategis Tiga yaitu Meningkatkan Nilai SPBE dengan Indikator Indeks SPBE pada tahun 2021 Nilai 1,68 , pada tahun 2022 Nilai 2.10 dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 2,68.

4. Sasaran strategis empat yaitu Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah dengan Indikator Satu Data Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022 Satu Data Indonesia belum di laksanakan dan pada tahun 2023 mendapatkan katagori terbaik seprovinsi Lampung
5. Sasaran strategis Lima yaitu Meningkatnya Pengamanan Informasi Publik Perangkat Daerah dengan Indikator KAMI tidak ada perubahan dari tahun 2021, 2022 dan 2023.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rentra Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 6 Program Kerja Utama. Keenam program kerja dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target Renstra Tahun 2023 Dengan Realisasi PK Tahun 2023 Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Sasaran Strategis	Program Kerja	Indikator	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target Renstra (%)	Target Renstra (%)	
Meningkatnya tingkat Tingkat Kepuasan Publik	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai standar kepuasan publik	80,89	80,89	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil	100	100	100

		Pemeriksaan yang ditindaklanjuti			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	75	75	100
Meningkatnya Nilai SPBE	Program pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Nilai SPBE	2.68	2.68	100
Meningkatnya Penggunaan Data untuk Perencanaan dan Pelaporan PD	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Satu Data Indonesia	Baik	Baik	100
Meningkatnya Pengamanan Informasi Publik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah PD yang teramankan Informasinya	43	61	70

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam mewujudkan sasaran strategis Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di dukung 5 Program 11 Kegiatan 28 Sub Kegiatan .Apabila dilihat rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama dan rata – rata capaian Indikator Program, maka diperoleh rata – rata perolehan capaian kinerja adalah 100% yang dapat dikategorikan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik , kecuali Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di karenakan adanya perubahan nomenklatur.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Standar Nasional
1	Meningkatnya Nilai SPBE	Indeks Nilai SPBE	Nilai	2,68	4,2 - < 5 Memuaskan 3,5 - < 4,2 Sangat Baik 2,6 - < 3,5 Baik 1,8 - < 2,6 Cukup < 1,8 Kurang

Dari 7 (tujuh) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Esselon 2, hanya ada satu indikator yang dapat dibandingkan dengan standar nasional, yaitu indikator Indeks Nilai SPBE. Pada tahun 2023 nilai Indeks Nilai SPBE mendapatkan nilai 2,68, dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan adanya progress yang positif pada tahun 2023.

3.1.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan Kinerja dan Solusi

Keberhasilan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dapat ditunjukkan dengan tercapainya target – target yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang pada tabel 3.2 dan tabel 3.4. Dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Yaitu :

a. Nilai Standar Kepuasan Publik

Sasaran strategis pertama adalah Meningkatnya Tingkat Kepuasan Publik terhadap Informasi Publik Indikator kinerja ini didukung oleh Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pada Tahun 2023 Nilai Indeks Kepuasan Publik bidang Komunikasi dan Informatika adalah 80,89 nilai tersebut masuk dalam kategori predikat “Baik” Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah , keberhasilan penyelenggaraan Informasi Publik ini tercapai karena penerima Informasi Publik memperoleh Informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Namun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah terus melakukan perbaikan dalam Pengelolaan Informasi Publik salah satunya dengan melakukan Survei Kepuasan Publik bidang Komunikasi dan Informatika ini. Hasil dari survei tersebut diperoleh hasil dengan nilai 80,86 sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 80,86, sehingga diperoleh ketercapaian realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 100%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target yang direncanakan.

Dengan adanya ketercapaian sasaran ini maka berdampak pada dengan semakin membaiknya pelayanan publik pada Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Namun tidak berhenti sampai disini saja, pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah akan terus ditingkatkan.

- b. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan , Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan evaluasi sangat penting karena menjadi panduan dalam Langkah Langkah mencapai tujuan yang ditetapkan . Pada kegiatan ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memperoleh capaian 100 %
- c. Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti capain Indikatornya 100 %, dari capaian ini menunjukkan Tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap rekomendasi yang di beriakn , hal ini menandakan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah serius dalam menangani masalah yang diidentifikasi dan telah mengambil langkah -langkah konkrit untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang lebih baik untuk Dinas Komunikasi Informatika dan statistik.
- d. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi baik indicator capaiannya 100% dengan capaian tersebut fasilitas dan Infrastruktur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika berada dalam kondisi baik dan optimal dengan demikian dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk memfalisitasi dan memberikan dukungan terhadap Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah
- e. Indeks Nilai SPBE
Untuk mendukung sasaran terselenggaranya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mampu mewujudkan pemerintah yang lebih bersih, akuntabel dan bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta terselenggaranya pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah untuk Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Dan juga menerbitkan peraturan sebagai dasar hukum Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2024. Tentang pedoman SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.. Nilai e- Government adalah nilai Indeks SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik.

Capaian indeks SPBE tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mencapai berpredikat SPBE baik. Bila dibandingkan selama 2 (dua) tahun capaian nilai indeks SPBE tahun 2023 menunjukkan adanya tren positif. Dalam rangka mendukung peningkatan penerapan layanan pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan persentase PD yang menerapkan e-government secara terintegrasi dan Persentase PD yang Terkoneksi Jaringan Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Berikut ini infrastruktur yang telah tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah:

f. Satu Data Indonesia

Dinas Komunikasi Informatika dan statistik Kabupaten Lampung Tengah memiliki tanggung jawab sebagai Wali Data yang meliputi pengawasan pengelolaan dan keamanan data , memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi, serta memfalisistasi akses yang aman dan tepat waktu ,Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah bekerjasama dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah untuk mampu mengembangkan dan menyajikan data mikro dan terinci pada setiap unit kerja sampai tingkatan terendah. Tersedianya Data dan Informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Pengembangan Dunia Usaha, Investasi dan Promosi merupakan sasaran yang harus dicapai.

Mengukur keberhasilan sasaran tersebut yang telah diuraikan di

atas, indikator kinerja utamanya yaitu persentase data pembangunan daerah lintas sektoral yang berkualitas. Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi perencanaan akan menghambat penyusunan perencanaan pembangunan daerah. berfungsi membangun data statistik sektoral dan informasi pembangunan Daerah.

d. Pengamanan Informasi Publik

Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting, dikarenakan kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan. Adanya ancaman tersebut membutuhkan adanya sebuah tata kelola keamanan informasi di setiap organisasi perangkat daerah yang merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik. Keamanan informasi merupakan suatu upaya mengamankan asset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul. Indikator tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini belum dapat diukur, dikarenakan belum terlaksananya assessment atau audit terhadap tingkat kematangan keamanan informasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

3.1.6 Analisis atas Efektifitas dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program Kerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tingkat Kepuasan Publik	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	94,26%	5,745
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	91,67%	92,25%	-0,58%

Meningkatnya Nilai SPBE	Program pengelolaan aplikasi informatika	100%	99,91%	0,09%
Meningkatnya penggunaan data untuk perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Program penyelenggaraan statistik sektoral	100%	92,1%	7,9%
Meningkat Pengamanan Informasi Publik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	0	100%

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari 5 sasaran strategis, terdapat 4 (empat) indikator yang mempunyai efisiensi anggaran dan 1 (satu) indikator yang tidak mempunyai efisiensi anggaran. Hal yang menarik terdapat pada sasaran Meningkatkan Pengamanan Informasi Publik, pada sasaran ini di tahun 2023, tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan sasaran tersebut, tetapi capaian kinerjanya dapat 100%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran bukan merupakan alasan untuk terlaksananya suatu Program dan Kegiatan, tapi jika itu memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi maka harus dijalankan. Terdapatnya *crosscutting* dari setiap Bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yaitu maksudnya anggaran yang tersedia, walaupun dialokasikan hanya untuk satu Program saja, tapi bisa dilaksanakan oleh Program lain dengan beriringan dengan Program yang dialokasikan anggarannya.

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 program dan 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang memiliki sasaran tujuan dan indikator yang terukur.

Selain program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, faktor pendukung lainnya adalah :

1. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Masyarakat yang ada dikampung dan kelurahan se-Kabupaten Lampung Tengah adalah ujung tombak keberhasilan penyebarluasan informasi dari semua sektor potensi maupun kekayaan yang ada diKampung dan Kelurahan sehingga publik bisa mengakses lewat Instagram dan Facebook dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai mutifator agar penyebarluasan informasi dapat terlaksana secara maksimal.

NO	Jumlah Kampung	Jumlah KIM	Prosentase
1	311	311	100

2. Jumlah Media yang kerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Lampung Tengah

Media	Jumlah Media yang Terdaftar di SIMASBRO	Jumlah Media yang Kerja sama	Prosentase
Media cetak harian	33 Media	31 Media	93,93%
Media Cetak Mingguan	121 Media	105 Media	86,77%
Media Online	221 Media	112 Media	50,67%
Media Streaming	24 Media	10 Media	41,66%
Media Televisi	15 Media	12 Media	80%
Majalah/Tabloid	6 Media	4 Media	66,66%
Microsite	5 Media	2 Media	40%
Radio	1 Radio	1 Media	100%

Terjadinya penurunan jumlah media yang melakukan pencairan karena pemerintah daerah kabupaten lampung tengah melalui dinas komunikasi informatika dan statistik hanya bekerjasama dengan media yang terdaftar di SIMASBRO dengan grade A,B dan C saja (334 Media), dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu pada tahun 2023 ada beberapa media yang tidak melakukan penagihan sebanyak 68 Media karena tidak mengambil PKS.

Media	Yang tidak Melakukan penagihan
Media cetak harian	3
Media Cetak Mingguan	11
Media Online	43
Media Streaming	3
Media Televisi	6
Majalah/Tabloid	0
Microsite	2
Radio	0

3. Capaian Persentase Keterbukaan Informasi Publik yang dapat menjangkau masyarakat luas di Kabupaten Lampung Tengah. Transparansi merupakan salah satu pilar penyelenggaraan pemerintah mendukung prinsip prinsip good governance. Indikator pertama Jumlah Media yang terdaftar di SIMASBRO bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yaitu persentase Jumlah Media yang Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik merupakan indikator yang mengukur keberhasilan sasaran terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018. Undang-undang tersebut memberikan jaminan setiap badan publik untuk dapat membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Indikator kedua Masyarakat Lampung Tengah merupakan salah satu pihak yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui Kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat mau pun dan Pemerintah Daerah. Indikator persentase penyebaran informasi publik dapat diukur dengan indikator capaian persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah. Parameter untuk mengukur capaian persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik menggunakan parameter sebagai berikut ini:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Masyarakat} \\
 \text{yang Menjadi Sasaran} \\
 \text{Penyebaran Informasi} \\
 \text{Publik} \\
 = \\
 \frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Menjadi Sasaran} \\
 \text{Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui} \\
 \text{Kebijakan dan Program Prioritas} \\
 \text{Pemerintah dan Pemerintah Daerah} \\
 \text{Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100
 \end{array}$$

Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik adalah orang-orang yang ditargetkan menerima dan memanfaatkan informasi, memahami kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu penduduk dengan rentang usia antara 5 sd 75 tahun. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lampung Tengah bahwa jumlah penduduk tahun 2023 dari rentang usia 5 sd 75 tahun adalah sebagai berikut :

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk Tahun 2023 (dalam ribuan)
5 - 9	59,56
10 - 14	59,19
15 -19	57,43
20 24	60,48
25 – 29	62,76
30 – 34	60,99
35 - 39	59,56
40 – 44	57,37
45 - 49	54,86
50 – 54	48,08
55 – 59	40,53
60 – 64	32,55
65 – 69	23,55
70 – 74	15,67
75 +	15,48
JUMLAH	706,06

Source Url : <https://lampungtengahkab.bps.go.id>

Capaian persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik Tahun 2023}}{165988} = \frac{706,060}{165988} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik tahun 2023 yang mencapai nilai < 50% yaitu 42,76%, capaian kinerja terkategori kurang berhasil.

Sedangkan parameter untuk mengukur capaian persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah menggunakan parameter sebagai berikut ini:

$$\frac{\text{persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{ Komunitas Masyarakat / Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah}} \times 100$$

Daftar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Lampung Tengah yang Berpartisipasi dalam Penyebaran Informasi Tahun 2023

NO	Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Telah Menyebarkan Informasi	Belum Menyebarkan Informasi
1	311	311	-

Capaian persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\text{Jumlah KIM}} = \frac{\text{Yang telah menyebarkan}}{\text{Jumlah KIM}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik tahun 2023 yang mencapai nilai > 70% yaitu 71,43 %, capaian kinerja terkategori berhasil.

4. Meningkatnya Nilai SPBE

Untuk mendukung sasaran terselenggaranya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mampu mewujudkan pemerintah yang lebih bersih, akuntabel dan bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta terselenggaranya pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah untuk Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Dan juga menerbitkan peraturan sebagai dasar hukum Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2024. Tentang pedoman SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.. Nilai e- Government adalah nilai Indeks SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik. Berikut ini parameter pengukuran indeks SPBE:

<i>NO</i>	<i>INDEKS</i>	<i>KRITERIA</i>
1	4,2 - < 5	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Capaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (tahun) dapat dilihat pada tabel berikut:

	Tahun Anggaran	Nilai Indeks	Kategori Capaian	Keterangan
1	2021	1,68	KURANG	-
2	2022	2,10	CUKUP	-
3	2023	2,68	BAIK	-

Capaian indeks SPBE tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mencapai berpredikat SPBE baik. Bila dibandingkan selama 2 (dua) tahun capaian nilai indeks SPBE tahun 2023 menunjukkan adanya tren positif. Dalam rangka mendukung peningkatan penerapan layanan pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan persentase PD yang menerapkan e-government secara terintegrasi dan Persentase PD yang Terkoneksi Jaringan Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaat TIK. Berikut ini infrastruktur yang telah tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah:

1. Layanan Data Center dengan Kapasitas 15 Tera sebagai pusat data, aplikasi dan pelayanan hosting bagi PD yang telah mempunyai website/ Aplikasi.
2. Penyediaan bandwidth koneksi internet 100 MBps yang dialokasikan untuk 13 PD di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai prioritas dan sebagai pilot project di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah
3. Website web Lampungengah.kab.go.id (online setiap hari) dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah membuat 13 akun email PD.

Berikut ini adalah Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi:

NO.	NAMA PD	DOMAIN
(1)	(2)	(3)
1.	Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah	https://inspektorat.lampungtengekab.go.id/
2.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	https://bapenda.lampungtengekab.go.id/
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	http://bappeda.lampungtengekab.go.id/
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah	https://disdukcapil.lampungtengekab.go.id/
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	http://diskes.lampungtengekab.go.id/
6.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah	https://dkptph.lampungtengekab.go.id/
7.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah	http://diskominfotik.lampungtengekab.go.id/
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah	https://diskopukmdag.lampungtengekab.go.id/
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah	http://dispppa.lampungtengekab.go.id/
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah	https://dpmptsp.lampungtengekab.go.id/
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah	http://disdikbud.lampungtengekab.go.id/

NO.	NAMA PD	DOMAIN
(1)	(2)	(3)
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah	http://ppkb.lampungtengahkab.go.id/
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah	https://dinasperhubungan.lampungtengahkab.go.id/
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah	http://dispusip.lampungtengahkab.go.id/
15.	Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah	https://disbunnakkan.lampungtengahkab.go.id/
16.	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah	https://dinsos.lampungtengahkab.go.id/
17.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah	http://disnaker.lampungtengahkab.go.id/
18.	RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah	http://rsud-dsr.lampungtengahkab.go.id/
19.	Sekretariat DPRD Kab. Lampung Tengah	https://dprd.lampungtengahkab.go.id/
20.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	http://balitbangda.lampungtengahkab.go.id/
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah	http://bkpsdm.lampungtengahkab.go.id/
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	https://bpbd.lampungtengahkab.go.id/
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah	https://bpkad.lampungtengahkab.go.id/
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah	http://kesbangpol.lampungtengahkab.go.id/

NO.	NAMA PD	DOMAIN
(1)	(2)	(3)
25.	Dinas Bina Marga (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah)	https://binamarga.lampungengahkab.go.id/
26.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	http://dlh.lampungengahkab.go.id/
27.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah	http://disporapar.lampungengahkab.go.id/
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah	http://dpmk.lampungengahkab.go.id/
29.	Dinas Pengairan (Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah)	http://pengairan.lampungengahkab.go.id/
30.	Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah	https://disperin.lampungengahkab.go.id/
31.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah)	http://dispkppck.lampungengahkab.go.id/
32.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	http://satpolpp.lampungengahkab.go.id/
33.	Sekretaris Daerah	http://setakab.lampungengahkab.go.id

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Struktur keuangan pada APBD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan

sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Renstra dan dokumen Rencana Kerja Tahunan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 8.574.583.786 dengan rincian belanja Pegawai Rp 3.241.303.239 belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.266.580.547 Belanja Modal Rp 66.700.000.

Tabel Realisasi Penyerapan APBD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaen Lampung Tengah Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentas e
1	Belanja Pegawai	3.241.303.239,00	2.878.972.565,57	100,5
2	Belanja Barang dan Jasa	5.266.580.547,00	5,042.700.550,00	95,74
3	Belanja Modal	66.700.000,00	65.450.000,00	98,13
	Jumlah	8.574.583.783.786	7.987.123,115,57	93,14

Realisasi Penyerapan APBD Berdasarkan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaen Lampung Tengah Tahun 2023

No	Program Dan Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.039.799.739	4.649.590.295	92,25
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.929.000.000	1.818.448.673	94,26
3	Pengelolaan Aplikasi dan informatika	1.565.784.047	1.564.448.250	99,91
4	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	40.000.000	36.852.300	92,1
5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0	0	

BAB IV PENUTUP

4.1. *Kesimpulan*

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dalam satu Tahun, merupakan instrumen pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dan umumnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah- langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa- masa mendatang. Dalam laporan kinerja ini, disamping mengemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing- masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka lakip ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu, LAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah ini diharapkan akan menumbuhkan sarandan kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksisistensi eksternal Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.

Di tahun 2023, capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah mempunyai rata-rata capaian 98,33 dengan kategori sangat berhasil. Sebagai satu-satunya instansi yang menangani bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah harus selalu menjaga kualitas kinerja, kerana hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Dengan

diterbitkannya LAKIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan dibidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang berkualitas serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

4.2. *Saran*

Untuk meningkatkan lagi kinerja dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah, diperlukan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Terus melakukan perbaikan untuk SPBE di Kabupaten Lampung Tengah, dengan melakukan inovasi-inovasi;
- 2) Dilakukan perbaikan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Perlu adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah agar pelaksanaan penyelenggaraan statistic sectoral dapat terus meningkat;
- 4) Dilaksanakan peningkatkan kualitas SDM dari Tenaga IT di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah;
- 5) Dilaksanakan peningkatan kualitas SDM dari pengelola Perencanaan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah;
- 6) Meningkatkan kerjasama dari setiap bidang untuk mendapatkan capaian kinerja yang maksimal.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



EDI SUPENA, Sos, MM

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19750111 20000 3 009